

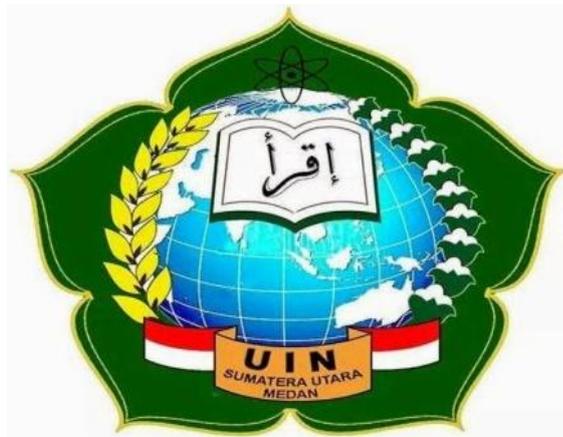
**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

OLEH :

RIJALUL AHMAD FIKRI

NIM : 27133005

Program Studi  
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

Oleh

**Rijalul Ahmad Fikri**  
**Nim. 27133005**

Dapat di Setujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE.) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 2 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marliyah, MA

NIP. 197601262003122003

Annio Indah Lestari M.Si

NIP. 197403092011012003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, MA

NIP. 197601262003122003

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA”an RIJALUL AHMAD FIKRI NIM 27133005 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan pada tanggal 22 November 2017 Skripsi ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S E) pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan , 13 September 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-  
SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Marliyah, MA  
NIP. 19760126 200312 2 003

Fauzi Arif Lubis, MA  
NIP. 19841224 201503 1004

Anggota

1. Annio Indah Lestari, , M.Si  
NIP. 19740309 201101 2 003

3. Dr. Marliyah, MA  
NIP. 19760126 200312 2 003

2. Yusrizal, SE.,M.Si  
NIP. 19750522 200901 1 006

4. Fauzi Arif Lubis, MA  
NIP. 19841224 201503 1004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Dr. AndriSoemitra, MA  
NIP. 19760507 200604 1 002

**CURICULUM VITAR**

Nama : Rijalul Ahmad Fikri

Bin : Idris

Tempat/Tanggal Lahir : Natal, 13 April 1995

Alamat : Jl. Kapten M. Jamil Lubis No 69

Pekerjaan : Mahasiswa

No Hp : 082276653827

Asal Sekolah : MAN Natal

Tahun Masuk : 2013

Pembimbing Akademik : Dra. Sri Sudiarti ,MA

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Pembimbing Skripsi I : Dr. Marliyah, MA

Pembimbing Skripsi II : Annio Indah Lestari M.Si

IPK : 3,25

Pendidikan : SD Negeri 358 Natal Berijazah Tahun 2007  
SMP Negeri 1 Natal Berijazah Tahun 2010  
MAN Natal Berijazah Tahun 2013



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rijalul Ahmad Fikri  
NIM : 27133005  
Tempat / Tanggal Lahir : Natal, 13 April 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Diponegoro No 1, Pasar II Natal Kecamatan  
Natal



### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 358 Berijazah Tahun 2007
2. Tamatan SMP Negeri 1 Natal Berijazah Tahun 2010
3. Tamatan MAN Natal Purba Baru Tahun 2013

### III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Osis SMP Negeri 1 Natal 2008-2009
2. Ketua Osis MAN Natal Tahun 2011-2012
3. Anggota HMJ Akuntansi Tahun 2014-2015

## KATA PENGANTAR

Assalamual'aikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kesehatan, kesempatan dan kelengkapan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara". Shawat bermutiarakan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut serta secara moril dan materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk yang teristimewa kedua orang tua tercinta Ayahanda Hanafi dan Ibunda Yusrawati, paman Basrizal Hamdi, bunda Junita Ariani dan adik tersayang Latiful Ahmad Hafidz'.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan pemahaman serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

4. Ibu Annio Indah Lestari M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahannya dan pemahaman serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
6. teman-teman Aks-A FEBI UIN SU 2013 yg juga selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluarga besar MAN Natal yang telah selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Kemudian juga seluruh sahabat-sahabat penulis Kelompok KKN Desa Tinggi Raja Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan
9. Sahabat sejawat seperjuangan sependaftaran di kosan tercinta yang selalu memberikan motivasi sebagai penyemangat bagi penulis.
10. Tanpa terkecuali sahabat Muhammad Ikhsandri, Muhammad Ilmi Zikri Firdaus, dan Rijal Hasan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis mohon ampun dan menyerahkan diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalam,

Medan, 7 November 2017

Penulis

Rijalul Ahmad Fikri

Nim. 27133005

## ABSTRAK

Rijalul Ahmad Fikri (2017). “**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA**” Dibawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Marliyah, MA, dan Pembimbing II Annio Indah Lestari M.Si

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Populasi penelitian ini adalah 33 (tiga puluh tiga) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sampel 33 (tiga puluh tiga) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Variabel dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel dependen. Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan dan parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teoritis .....	10
1. Kajian Teoritis.....	10
a. Belanja Modal .....	12
b. Pendapatan Asli Daerah .....	12
c. Pertumbuhan Ekonomi .....	15
B. Kajian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran .....	27
D. Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Populasi Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Definisi Oprasional .....	31
F. Thenik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	35
G. Analisis Data .....	35

<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Dekripsi Data Penelitian .....	42
B. Hasil Penelitian .....	44
1. Uji Normalitas .....	44
2. Uji Asumsi Klasik .....	45
a. Uji Multikolinearitas .....	46
b. Uji Heteroskeditas .....	47
c. Uji Autokorelitas .....	49
3. Uji Hipotesis .....	53
a. Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
b. Uji F .....	54
c. Uji t .....	56
C. Pembahasan.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

1.1	Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2010-2015.....	2
1.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara .....	3
1.3	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah .	4
2.1	Kajian Terdahulu .....	22
3.1	Sampel Penelitian .....	30
4.1	Statistik Deskriptif.....	42
4.2	Uji Multikolinearitas .....	46
4.3	Uji Heteroskeditas .....	48
4.4	Uji Autokorelasi .....	49
4.5	Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson .....	50
4.6	Uji Chow .....	52
4.7	Uji Hausman.....	53
4.8	Nilai Koefisien Determinasi, Uji F, dan Uji t.....	53

**DAFTAR GAMBAR**

2.1	Kerangka Teoritis.....	28
4.2	Uji Normalitas.....	54
4.10	Perhitungan Nilai Kritis F.....	55
4.11	Perhitungan Nilai Kritis t.....	57

## **BAB I**

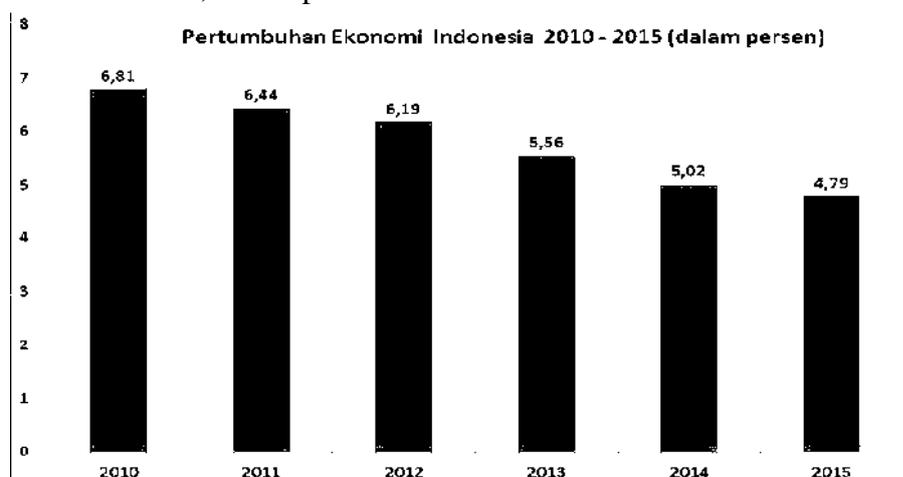
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Gambaran umum perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,23% pada tahun 2012. Pada tahun 2012 perekonomian Indonesia masih stabil, ini dibuktikan dengan tidak terpengaruhnya Indonesia terhadap krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat. Dari pengamatan para ahli dan pengamat ekonomi, Indonesia masih di jalan yang baik dan tetap akan memberikan pertumbuhan positif yang kemungkinan besar bertumbuh diantara 5,5% - 6,5% dengan inflasi di level 5% - 7% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berada di level 8900-9300. Tahun 2013 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia turun ini dibuktikan dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar 5,78% ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu 6,23%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh negara-negara yang tadinya terdampak krisis ekonomi seperti China dan Amerika mulai pulih. Ini artinya perekonomian global berdampak pada ekonomi di Indonesia, terutama untuk sektor ekspor dan sektor lainnya seperti wisata mancanegara tahun 2014 kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan melalui indikator makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,1%, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2014 yang sebesar 5,5%. Ini tentu terkait dengan kondisi global dan kondisi perekonomian

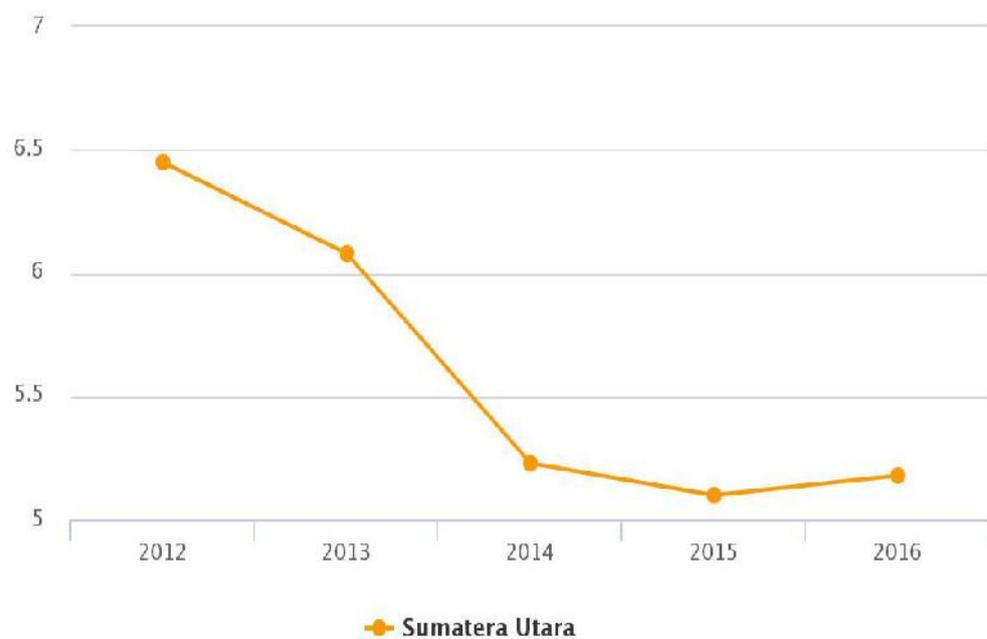
Indonesia, dimana besarnya defisit transaksi berjalan membuat baik kebijakan moneter dan fiskal sifatnya kebijakan yang ketat. Selain itu tingkat inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8,36%, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2014 yang sebesar 5,3%. Hal ini terjadi karena APBN-P 2014 belum mengasumsikan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Realisasi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,8%, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014 sebesar 6,0%. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,79%. Lesunya perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara melambat. Penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah anjloknya konsumsi rumah tangga. Sepanjang 2015, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,96%. Angka tersebut lebih rendah dibanding 2 tahun sebelumnya yang mencapai 5,43% di tahun 2013 dan 5,16% di tahun 2014. Anjloknya konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari kenaikan harga pangan, mahalnya harga pangan membuat masyarakat mengerem belanjanya. Total inflasi di tahun 2015 tercatat rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,35%. Inflasi mengenai makanan jadi, rokok, dan tembakau 6,42% serta inflasi bahan makanan 4,93%. Kenaikan harga pangan diyakini hanya dinikmati di level pedagang, hal ini lah yang menyebabkan penurunan daya beli sekaligus memperlebar kesenjangan antara pedagang dan produsen atau petani

Tabel 1,1 tabel pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2015



Sumber : Data BPS ( Badan Pusat Statistik)

**Tabel 1.2 grafik pertumbuhan ekonomi sumatera utara dari tahun 2012-2016**



**Sumber : Data BPS (Badan Pusat Statistik)**

Dari gambar pertumbuhan ekonomi di atas dapat diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun ini turun di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara di angka 6,45% dan ditahun selanjutnya 2013 sebesar 6,08%, tahun 2014 sebesar 5,23%, tahun 2015 sebesar 5,10% dan tahun 2016 sebesar 5,18% dengan Belanja modal dan pendapatan asli daerah yang besar seharusnya laju pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik lagi. Belanja modal Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 adalah sebesar 7.869.007.000 triliun, tahun 2014 sebesar 8.043.066.000 triliun, dan tahun 2015 sebesar 8.292.657.000 triliun. Pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 adalah sebesar 3.494.154.000 triliun, tahun 2014 sebesar 3.499.000.000 triliun dan tahun 2015 sebesar 4.121.662.000 triliun.

Tabel 1,3 Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah
2013	6,08%	7.869.007.000	3.494.154.000
2014	5,23%,	8.043.066.000	3.499.000.000
2015	5,10%	8.292.657.000	4.121.662.000

Setiap daerah mempunyai hak dalam mengelola keuangannya sendiri, dalam hal mengelola keuangan daerah nya sendiri disebut dengan Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan. Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD<sup>1</sup>. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran

<sup>1</sup>Warsito Kwedar, dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Undip, 2008), h. 31.

melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda<sup>2</sup>. Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai

---

<sup>2</sup> Priyo Hari Adi, “Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevasinya dengan Pertumbuhan Ekonomi” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2012), h. 2.

fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah<sup>3</sup>, Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen<sup>4</sup>. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik<sup>5</sup>. menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut<sup>6</sup>. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak

---

<sup>3</sup> Wong John D. “*The Fiscal Impact Of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*” dalam *Journal of Public Budgeting*, 413-423, Oktober 2004, h. 413-450.

<sup>4</sup> Bastian Indra, *Akuntansi Sektor Publik* ( Jakarta: Erlangga, 2006), h. 109.

<sup>5</sup> Darwanto dan Yulia Yustikasari. “ *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*” dalam Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar, Juli 2007 h. 39.

<sup>6</sup> Kuncoro Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 42.

selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun 2012 sebesar Rp6.727.26 miliar ke tahun 2015 sebesar Rp 8.674.83 miliar, kenaikan ini menunjukkan Pemkab/Pemko di Sumatera Utara mampu menggali potensi pendapatan di daerahnya masing masing walaupun ada juga di beberapa kabupaten/kota yang belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tentunya akan merangsang pemerintah daerah meningkatkan layanan ke publik sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat seiring meningkatnya pendapatan per kapita.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti menuangkan penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul: *“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah yang akan diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, Belanja Modal dan Pendapatan asli daerah (PAD). Kota/kabupaten yang diteliti adalah kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara yaitu terdiri dari 33 kota/kabupaten

### **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah yang akan diteliti hanya untuk menganalisis laporan realisasi APBD tahunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

### **E. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara Simultan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti sebagai bahan masukan mengenai pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada didaerah
2. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi

3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian sejenisnya

## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penyalokannya. Perolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada giliran terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pembangunan dalam sektor pelayanan akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Peranan Belanja Modal dalam Desentralisasi Fiskal Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam

perekonomian secara makro<sup>12</sup>. Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik<sup>3</sup>. meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak atau pun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif. Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3% merupakan retribusi. Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah. Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak<sup>4</sup>. menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan

---

1

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2004), h. 112.

<sup>2</sup> Lewis Blane D, *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charge in Indonesia*. (North Carolina, Trinagle Institue, 2003), h. 9.

<sup>3</sup> Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu, *Fiscal Decentralization and Economi Growth in China*. (Chicago Economi Development and Cultural Change, Chicago, 2000), h. 21.

mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional<sup>5</sup>.

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurang mampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak

---

<sup>4</sup>Majidi N, *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. (Jakarta, Prisma LP3ES,1997), h. 95.

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/ekspor

indikator variabel Pendapatan Asli Daerah ini dapat di hitung dengan rumus

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Keterangan

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

## 7) Pajak Parkir

### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis Pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek

### c. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
3. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat Dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap Mata uang asing

- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### **3. Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertumbuhan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangunan ekonomi. dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik dan model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan bertahap linier menekankan pada pemahaman bahwa proses pembangunan merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, dan juga menyoroti pembangunan sebagai perpaduan dari tabungan, penanaman modal dan bantuan asing. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah tahapan tinggal landas, yang ditandai dengan adanya pengerahan atau mobilisasi tabungan yang dijelaskan oleh model pertumbuhan Harrod-Domar. Model yang berkembang selanjutnya adalah perubahan struktural dan ketergantungan internasional yang perbedaan diantara keduanya lebih pada perbedaan secara ideologis.

Model pertumbuhan yang berkembang pada tahapan berikutnya adalah model pertumbuhan neoklasik, dimana model pertumbuhan Solow menjadi pilarnya. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output bersumber dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari hal-hal yang bersifat eksogen atau proses-proses kemajuan teknologi yang bersifat independen.

Kelemahan yang terdapat pada teori neo klasik adalah bahwa pengaruh teknologi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh faktor-faktor ekonomi, mengakibatkan munculnya model pertumbuhan yang baru yaitu pertumbuhan endogen. Model ini tetap berdasarkan pada model yang dikembangkan oleh kaum neoklasik, namun berkebalikan dengan pendapat kaum neo klasik, model pertumbuhan endogen mengakui dan menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

## Keterangan

$G$  = Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_1$  = PDRB ADHK pada suatu tahun

$PDRB_0$  = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

### 4. Hubungan variabel

#### 1. Hubungan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas<sup>6</sup>. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah<sup>7</sup>. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat

---

<sup>5</sup> Ismerdekanisih Herlina dan Endah Sri Rahayu, *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia*. (Semarang, UNIMUS Central Library, 2002), h. 15.

<sup>6</sup> Saragih Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), h. 47.

produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita<sup>8</sup>.

## 2. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah<sup>9</sup>. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah<sup>10</sup>

PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalani pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat

---

<sup>7</sup> Adi, Priyo Hari, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali* (Salatiga, Jurnal kritis Universitas Kristen Satya Wacana, 2005), h. 8.

<sup>8</sup> Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, dalam Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STAIN LAN, Bandung, 10 April 2002, h. 12.

<sup>9</sup> Brata, Aloysius Gunadi, *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. (Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya, 2004), h. 21.

agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

### 3. Arti Pertumbuhan Daerah Bagi Kemandirian Daerah

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini<sup>11</sup> :

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreativitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien. Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal.

Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan)pemerintah daerah<sup>12</sup>. Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 pada tahun 2002 dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %.menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-

---

<sup>10</sup> Iskandar Putong, *Pengantar ekonomi mikro dan makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010), h. 254.

<sup>11</sup> BAPPENAS. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah* Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta, 2003, h. 45

masing pemda sebesar 76 % dan 46 %.Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya Kabupaten dan Kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.Sektor-sektor industri khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri .Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan eksekusi nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini. Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan propinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PD RB lebih banyak keluar dari daerah tersebut Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi,dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah

1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia

merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan

2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian
4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, dan sebagainya

Sumber Daya Modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

## B. Kajian Terdahulu

NO	Penelitian ( Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ulfi Maryati dan Endrawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>- Dana Alokasi Umum (DAU)</li> <li>- Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> <li>- Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)</li> <li>- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ul>
2	Nur Indah Rahmawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja Daerah Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Ko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>- Dana Alokasi Umum (DAU)</li> <li>- Belanja Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl)</li> <li>- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap</li> </ul>

		ta di Jawa Tengah		alokasi belanja tidak langsung (abl) - Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl)
3	Wulan Fauznyi	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi khusus (DAK) pajak/bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kot a provinsi jawa tengah tahun 2003-2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah (PAD)</li> <li>- Dana Alokasi khusus (DAK)</li> <li>- Dana bagi hasil (DBH) pajak/buka n pajak</li> <li>- Pertumbuh an ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat 5%</li> <li>- Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat signifikan 5%</li> <li>- Berdasarkan model FEM dihasilkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan DBH berpengaruh negatif dan</li> </ul>

				tidak signifikan terhadap PDRB
4	Asmaul Husna dan Myrna Sofia (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana perimbangan</li> <li>- Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- Lain-lain pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ul>
5	Decta Pitron Lugastoro (2013)	Analisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD</li> <li>- Dana Perimbangan</li> <li>- Indeks Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks</li> </ul>

		Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Manusia (IPM)	<p>pembanguna manusia kabupaten/kota di jawa timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembanguna manusia kabupaten/kota di jawa timur</li> <li>- DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM</li> </ul>
6	Mohammad Rizal Mubaroq Sutyastie S. Remi dan Bagdja	Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan Desentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi Pemerintah</li> <li>- Tenaga Kerja</li> <li>- Desentralisasi Fiskal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk setiap kenaikan 1% ratio balanja modal terhadap PDRB berlaku akan</li> </ul>

	Muljarijadi (2013)	Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2007-2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	<p>memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,035%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap kenaikan 1000 orang tenaga kerja di kabupaten di Indonesia akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebesar 0,004%</li> <li>- Desentralisasi fiskal yang diproksi antara pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah juga memberikan kenaikan ekonomi sebesar 0,069% untuk kenaikan 1% tingkat kemandirian daerah.</li> </ul>
7	Danar Indrakusuma Sukoco (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana Alokasi Umum</li> <li>- Dana Alokasi Khusus</li> <li>- Dana Bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Dana alokasi umum berpengaruh terhadap</li> </ul>

		Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur	Hasil	pertumbuhan ekonomi - Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
--	--	---------------------------------------	-------	---

Sumber :

1. Decta Pitron Lugastoro (2013) universitas brawijaya
2. Danar Indrakusuma Sukoco (2015) universitas islam negeri malang
3. Mohammad Rizal Mubaroq Sutyastie S. Remi dan Bagdja Muljarjadi (2013) universitas padjadjaran
4. Wulan fauzyani (2015) universitas islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Ulfi Maryati dan Endrawati (2010) universitas undayana
6. Nur Indah Rahmawati (2010) universitas di ponegoro
7. Asmaul Husna dan Myrna Sofia (2013) universitas udayana

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Adapun kerangka teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

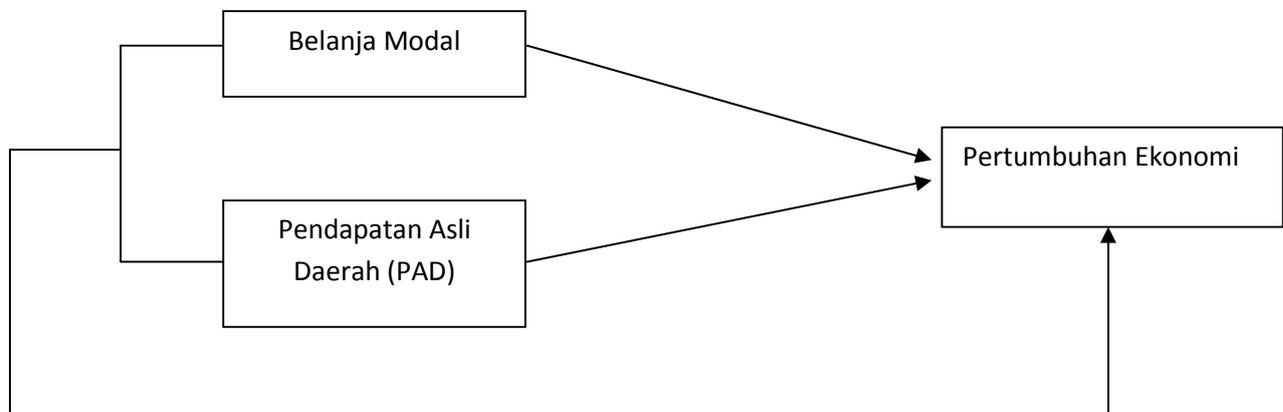
1. Pertambahan belanja modal yang juga bertambah social overhead capital (SOC) termasuk didalamnya semakin meningkat dan baiknya infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja modal atau pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), h. 56.

2. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri<sup>14</sup>

Gambar 2,1 Kerangka Teoritis



#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H3: Belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

<sup>13</sup> Tulus Tambunan, *Kondisi Infrastruktur di Indonesia*, (Jakarta, kadin Indonesia Jetro, 2006), h. 36.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang analisis lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. Pendekatan kuantitatif disebut juga pendekatan traditional, positivism, eksperimental dan empiris adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Asosiatif Kausal, dimana penelitian Asosiatif Kausal ini adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen<sup>1</sup> (variabel yang dipengaruhi)

#### **B. Lokasi penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera utara Jl. Asrama No, 179 Medan

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di provinsi sumatera utara. Penulis dalam penelitian mengambil populasi dengan berbagai kriteria

1. Kabupaten/kota tercatat PDRB atas dasar harga konstan di Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2015
2. Kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (jakarta, Gramedia, 2007), h. 30.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera utara

3. Kabupaten/kota mencantumkan data-data mengenai PAD dan belanja modal pada laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.

Sampel dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera utara

Tabel: 3,1 Daftar sampel penelitian

NO	NAMA KAB/KOTA	KRITERIA			SAMPEL
		1	2	3	
1	Asahan				1
2	Dairi				2
3	Deli serdang				3
4	Tanah karo				4
5	Labuhan batu				5
6	Langkat				6
7	Mandailing natal				7
8	Nias				8
9	Simalungun				9
10	Tapanuli selatan				10
11	Tapanuli tengah				11
12	Tapanuli utara				12
13	Toba samosir				13
14	Binjai				14
15	Medan				15
16	Pematang Siantar				16
17	Sibolga				17
18	Tanjung Balai				18
19	Tebing Tinggi				19
20	Padang Sidempuan				20
21	Pakpak Bharat				21
22	Nias Selatan				22
23	Humbang Hasundutan				23
24	Serdang Bedagai				24

25	Samosir				25
26	Batu Bara				26
27	Padang Lawas				27
28	Padang Lawas Utara				28
29	Labuhan Batu Selatan				29
30	Labuhan Batu Utara				30
31	Nias Utara				31
32	Nias Barat				32
33	Gunung Sitoli				33

#### **D. Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain sehingga dapat dimanfaatkan untuk diproses lebih lanjut. Sumber data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder yang digunakan merupakan data time series dari PAD dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2015. Sumber data penelitian adalah dokumen laporan realisasi APBD melalui situs ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2015 dapat diperoleh data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja Modal, sedangkan data mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

#### **E. Defenisi oprasional**

##### **1. Pendapatan Asli daerah**

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam priode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahn daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh

karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah

Pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu mengali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan diadaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri

Menurut undang-undang no 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembanguna dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintahan pusat  
PAD dapat dirumuskan sebagai berikut<sup>2</sup>:

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Keterangan

PAD : Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Medan, Salemba Empat, 2007), h. 96.

PPD	: Pendapatan Pajak Daerah
PRD	: Pendapatan Retribusi Daerah
LPS	: Lain-lain PAD yang dipisahkan
HPKDD	: Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur dengan satuan rupiah

## 2. Belanja Modal

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, *jogging track*, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan *output* berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Sebagai contoh adalah belanja modal untuk pembangunan kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) atau inspektorat daerah. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa belanja modal adalah belanja publik, atau sebaliknya, belanja publik adalah belanja modal. Pengategorian ke dalam belanja publik dan belanja aparatur mengandung bias dari aspek penggunaan makna fungsi (*outcome*) belanja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah

pengeluaran anggaran untuk perolehan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu priode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan peralatan dan asset tak berwujud. Belanja Modal dihitung dengan rumus<sup>3</sup>

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$$

Keterangan

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Banguna

BJIJ : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Variabel balanja modal dalam penelitian ini diukur dengan satuan rupiah

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pengukuran variabel pertumbuhan ekonomi dihitung dengan<sup>4</sup>

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Keterangan

G = laju pertumbuhan ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan

<sup>4</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*.( Jakarta, kencana prenatal media, 2016), h. 232.

## **F. Tehnik dan Instrument Pengumpulan Data**

Jenis Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti jurnal-jurnal, media massa, buku, dokument dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber lain. Dan memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini dari Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara ([sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id)). Dimana instrument pengumpulan data merupakan kumpulan data dari laporan anggaran pemerintah pada priode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

## **G. Batasan Oprasional**

Atas pertimbangan-pertimbangan efisiensi, minat, keterbatasan waktu dan tenaga, serta pengetahuan penulis, maka penulis melakukan beberapa batasan konsep terhadap penelitian ini

1. Penelitian ini dibatasi hanya selama 3 tahun dari tahun 2013-2015
2. Penelitian dilakukan hanya terbatas pada laporan APBD Kabupaten/Kota yang ada di provinsi sumatera utara yang sudah terpublikasi
3. Penelitian ini meneliti variabel-variabel antara lain Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi

## **H. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis Kuantitatif, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau beberapa variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuan utama analisis regresi adalah

menjelaskan perilaku variabel tak bebas sehubungan dengan perilaku satu atau lebih variabel bebas, dengan memperhitungkan fakta bahwa hubungan antara semua variabel tersebut bersifat tidak pasti<sup>5</sup>.

Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis *Least squares* (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda, masing-masing akan dijelaskan dibawah ini

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan kemudian menyajikannya dalam bentuk yang baik. Beberapa hal yang termasuk ke dalam bagian ini adalah mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data serta menyajikannya<sup>20</sup>. Analisis ini menggunakan alat-alat seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Analisis ini digunakan untuk tujuan memberikan gambaran hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

#### 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data terbebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik ini penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian yang minimum ( Best Linier Unbiased Estimator = BLUE), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Untuk itu perlu dibuktikan lebih lanjut apakah model regresi yang

---

<sup>5</sup> Gujarati, Damodar N, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Jakarta , Erlangga, 2007), h. 27.

digunakan sudah memenuhi asumsi tersebut. Asumsi-asumsi tersebut antara lain

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen)<sup>6</sup>.

Menurut Rimbawan<sup>7</sup> model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel bebas. Menurut Usman<sup>8</sup> ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kolinieritas tersebut antara lain:

1. Varian koefisien regresi menjadi besar
2. Varian yang besar sebagaimana dibicarakan di atas, menimbulkan beberapa permasalahan
3. Sekalipun multikolinieritas dapat mengakibatkan banyak variabel yang tidak signifikan, tetapi koefisien determinasi ( $R^2$ ) tetap tinggi, dan uji  $f$  signifikan. Secara matematis kedua hal tersebut dapat diketahui penyebabnya.
4. Hal ini yang terkadang terjadi adalah angka estimasi koefisien regresi yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi, atau kondisi yang dapat diduga atau dirasakan akal sehat, sehingga dapat menyesatkan interpretasi

Cara untuk mendeteksi terhadap multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan seperti  $R^2$  yang tinggi dan uji  $F$  yang signifikan, tetapi banyak koefisien regresi dalam Uji  $t$  yang tidak signifikan. Atau secara substansi interpretasi yang di dapat meragukan. Dan cara untuk mengatasinya kolinieritas antara lain:

1. Melihat informasi sejenis yang ada

---

<sup>6</sup> Winarno, Wing Wahyu, *Analisis Ekonomika dan Statistik dengan Eviews*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011), h. 59.

<sup>7</sup> Rimbawan, Nyoman Dayuh, *Statistik Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Denpasar, Udayana University Press, 2011), h. 40.

<sup>8</sup> Usman Husaini, *Pengantar Statistika*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), h. 67.

2. Mengeluarkan variabel bebas yang kolinier dari model
3. Mentransformasikan variabel antara lain dengan melakukan perbedaan (difference), membuat rasio dan berbagai transformasi lain.
4. Mencari data tambahan

b. Uji Heteroskedastitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila variabel tak bebas ( $Y_i$ ) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas ( $X_i$ ), maka varian dari  $Y_i$  adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Jika varians dari residual antara satu pengamat dengan pengamat yang lain berbeda disebut heteroskedasitas, sedangkan model yang baik adalah tidak mengandung heteroskedasitas. Heteroskedasitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi  $< 0,05$ , maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedasitas.

c. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal sehingga analisis validitas, reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov  $> 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada priode tertentu berkorelasi dengan variabel pada priode lain, dengan kata lain gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang saling terkait. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang di estimasikan menjadi bias dan varian minimum, sehingga tidak efisien

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch-godfrey (BG Test). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu dengan menggunakan model autoregressive dengan orde sebagai berikut

$$U_t = \alpha_1 U_{t-1} + \alpha_2 U_{t-2} + \dots + \alpha_k U_{t-k} + E_t$$

Dengan H0 adalah  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$ , dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual, apabila  $F$  tabel lebih kecil dibandingkan dengan  $Obs \cdot R$ -squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model dapat ditolak. Nilai  $F$  tabel diperoleh hasil *degree of freedom* (df) atau hasil dari (n-k).

e. Model Regresi

Model persamaan yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan

- Y = pertumbuhan ekonomi
- $\alpha$  = konstanta
- $\beta_1$  = koefisien regresi pendapatan asli daerah
- $\beta_2$  = koefisien regresi Belanja modal

---

<sup>9</sup> Edi Syahputra, *Statistik Terapan*. (Medan, Unimed Press, 2016), h. 73.

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Belanja Modal

$e$  = Nilai residu

f. Uji Hipotesis

1. Uji  $R^2$  ( Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005 : 83). Nilai  $R^2$  terletak antara 0 sampai dengan 1. Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai  $R^2$  mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan

2. Uji F (uji signifikansi simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis ( $H_a$ )

$H_a$  diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

2. Menentukan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 0,05$ )

3. Berdasarkan probabilitas.  $H_a$  akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05

4. Menentukan nilai koefisien determinasi, dimana koefisien menunjukkan seberapa besar variabel independen pada model yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependennya.

3. Uji t (uji parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing rasio keuangan secara individu terhadap minimalisasi resiko. Langkah-langkah pengujian

yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Merumuskan hipotesis ( $H_a$ )  
 $H_a$  diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dependen secara parsial.
2. Menentukan tingkat signifikansi sebesar 0.05
3. Berdasarkan probabilitas.  $H_a$  akan diterima jika nilai probabilitas kurang dari 0,05

Menentukan variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Hubungan ini dapat dilihat dari koefisien regresinya

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dekripsi Data Penelitian

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2015. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut

Tabel 4.1 statistik deskriptif dari Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2015

	Pendapatan asli daerah	Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi
Mean	112270868.7	229711701.4	5.6277777788
Median	43361000	170453000	5.43
Maximum	1758788000	1201667000	17.43
Minimum	8200000	163435	4.11
Std. Dev	2.89152160.6	193085370.3	1.387761048
Skweness	4.874692748	3.414324182	6.529270817
Kurtosis	23.89506225	12.38565194	54.27535555
Sum	11114816000	22741458435	557.15
Observations	99	99	99

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 kota/kabupaten yang telah memenuhi kriteria sampel yang ditentukan 33 kota/kabupaten yang menjadi sampel datannya dari tahun 2013-2015

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui nilai belanja modal minimum adalah 163435 sedangkan nilai belanja modal maksimum adalah 1201667000. nilai Belanja Modal minimum terjadi dikota Tebing Tinggi pada tahun 2013, sedangkan nilai belanja modal maksimum terjadi di Kota Medan tahun 2013. Diketahui tara-rata (mean) Belanja Modal dari Tahun 2013-2015 adalah 229711701.4. dan standar deviasi belanja modal dari tahun 2013-2015 adalah 193085370.3. perhatikan bahwa nilai standar deviasi belanja modal yang lebih rendah dari nilai rata-rata belanja modal dapat diinterpretasikan bahwa besarnya simpangan data menunjukkan rendahnya fluktuasi dari data belanja modal pada periode 2013-2015. Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui nilai PAD minimum adalah 8200000 sedangkan nilai PAD maksimum adalah 1758788000. Nilai PAD minimum terjadi di Nias Bharat Pada tahun 2013, sedangkan nilai PAD maksimum terjadi di Kota Medan pada Tahun 2013. Diketahui rata-rata (mean) PAD dari tahun 2013-2015 adalah 112270868.7, dan standar deviasi PAD dari tahun 2013-2015 adalah 289152160.6. perhatikan bahwa nilai standar deviasi PAD yang lebih tinggi dari nilai rata-rata PAD yang diinterpretasikan bahwa kecilnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi dari data PAD pada periode 2013-2015 PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk

lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui nilai minimum pertumbuhan ekonomi adalah 4.17, sedangkan nilai maksimum pertumbuhan ekonomi adalah 17.43, pertumbuhan ekonomi minimum terjadi di kabupaten Batu Bara pada tahun 2015, sedangkan nilai maksimum pertumbuhan ekonomi terjadi di kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2013. Diketahui rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013-2015 adalah 5.627777778, dan standar deviasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013-2015 adalah 1.3877610477397. Perhatikan bahwa nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari nilai rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi dapat diimpresasikan bahwa kecilnya simpangan data menunjukkan rendahnya fluktuasi dari data pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2013-2015

## **B. HASIL PENELITIAN**

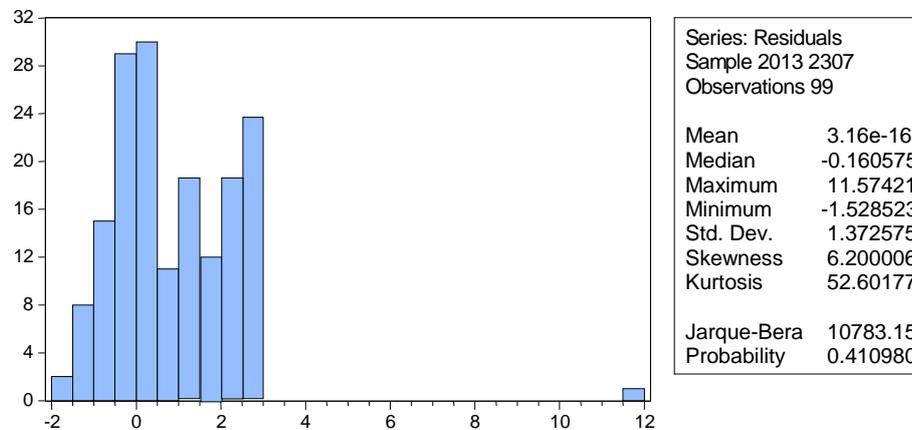
### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji tt dan ff mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel besar. Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut:

jika nilai probabilitas  $p < 0.05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi

jika nilai probabilitas  $p > 0.05$  maka asumsi normalitas tidak terpenuhi

Gambar 4.2 Uji Normalitas



Dari hasil tabel 4,2 dapat di simpulkan bahwa nilai probsbilitas lebih kecil dari tingkat signifikasi, yakni 0,05 hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi

## 2. UJI ASUMSI KLASIK

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat best linear unbiased estimator (BLUE). Di samping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrika yang melandasinya. Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesa harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan unruk mendapatkan model regresi yang tidak bias dan efisien.

Estimasi dan parameter-parameter dengan metode ordinary least square (OLS) akan memiliki ketidakbiasan (unbiasedness), varians yang minimum (minimum varians), dan sebagainya yang disebut best linear unbised estimator<sup>1</sup> (BLUE). Dalam penggunaan regresi linear berganda, terdapat empat uji asumsi klasik, yaitu

1. Uji normalitas
2. Uji multikolinearitas
3. Uji autokorelasi
4. Uji heteroskeditas

<sup>1</sup> J, Supranto, *Ekonometrika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005), h. 70.

### A. Uji Multikolenearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas<sup>2</sup>. Ketika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi maka permasalahan ini disebut dengan istilah multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas yang sempurna, maka koefisien-koefisien regresi dari variabel bebas dapat ditentukan. Jika terjadi multikolinearitas yang tinggi, koefisien-koefisien regresi dari variabel dapat ditentukan, namun memiliki standar error yang tinggi yang berarti bahwa koefisien-koefisien regresi tersebut tidak dapat di estimasikan dengan tepat atau akurat, maka dengan itu seharusnya tidak terjadi hubungan linear yang sempurna dari dua atau lebih variabel bebas. Jadi variabel-variabel bebas seharusnya tidak berkorelasi terlalu tinggi

Dalam penelitian ini gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Antar variabel independent ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,9) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

	PAD	Belanja Modal
PAD	1.000000	0,663527
Belanja Modal	0.663527	1.000000

Sumber : hasil olahan software Eviews 7

---

<sup>2</sup> Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang, BP Undip, 2011), h. 105.

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa korelasi antara pendapatan asli daerah (PAD) dan Belanja Modal sebesar 0,663527. Dari hasil pengujian multikolinearitas pada gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independent gejala multikolinearitas terjadi apabila nilai korelasi antar variabel independent lebih besar dari 0.90<sup>3</sup>

### **B. Uji Heteroskeditas**

Uji heteroskeditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain . jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskeditas dan jika berbeda disebut heteroskeditas. Homoskeditas sebagai varians kesalahan pengganggu  $\epsilon_{ii}$  untuk setiap pengamatan  $XX_{ii}$  adalah sama sedangkan heteroskeditas adalah sebaliknya

Model regresi yang baik adalah yang homoskeditasnya atau tidak terjadi heteroskeditas. Apabila terjadi heteroskeditas, estimator-estimator yang dihasilkan dengan metode OLS (*ordinary least square*) tidak lagi memiliki sifat varians yang minimum atau efisien dalam keadaan heteroskeditas, ketika tetap menggunakan metode OLS yang biasa, maka uji t dan uji F dapat memberikan kesimpulan yang salah. Deteksi ada tidaknya heteroskeditas dapat dilakukan dengan uji white. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat angka probabilitas dari uji White dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika nilai Prob. Chi-square dari obs R- squared  $\geq 0,05$ . Maka tidak terjadi heteroskeditas

Jika nilai Prob. Chi-square dari obs R- squared  $\leq 0,05$ . Maka terjadi heteroskeditas

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 91.

Tabel 4.4 Uji Heteroskeditas dengan Uji White

## Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.292059	Prob. F(2,96)	0.7474
Obs*R-squared	0.598729	Prob. Chi-Square(2)	0.7413
Scaled explained SS	14.52571	Prob. Chi-Square(2)	0.0007

## Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/19/17 Time: 21:29

Sample: 2013 2307

Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.310412	1.616253	0.810772	0.4195
PENDAPATAN_ASLI_DAE				
RAH^2	-5.95E-18	7.84E-18	-0.759166	0.4496
BELANJA_MODAL^2	1.25E-17	1.69E-17	0.738561	0.4620
R-squared	0.006048	Mean dependent var		1.864933
Adjusted R-squared	-0.014660	S.D. dependent var		13.46480
S.E. of regression	13.56314	Akaike info criterion		8.082423
Sum squared resid	17660.04	Schwarz criterion		8.161063
Log likelihood	-397.0799	Hannan-Quinn criter.		8.114241
F-statistic	0.292059	Durbin-Watson stat		2.031041
Prob(F-statistic)	0.747385			

Sumber : hasil olahan software e Views

Berdasarkan tabel 4.4 nilai Prob. Chi-squared = 0,7413 > 0,05. Maka asumsi homoskeditas terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala heteroskeditas yang tinggi pada residual

### C. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi merupakan suatu uji untuk memeriksa apakah untuk setiap dua pengamatan residual saling berkorelasi atau tidak, autokorelasi tidak terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu yang satu dengan yang lainnya. Meskipun terjadinya autokorelasi terhadap estimator-estimator yang dihasilkan oleh metode ordinary least square (OLS) tetap tak bias, konsisten, dan terdistribusi normal secara asimtotis, namun, namun estimator-estimator tersebut tidak lagi efisien. Sebagai akibatnya, pada uji t, F, dan chi kuadrat tidak lagi sah untuk digunakan. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan uji Breusch-goldfrey (BG Test). Dengan ketentuan sebagai berikut

Jika nilai prob. Chi-Square dari Obs \*R-squared 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi

Jika nilai prob. Chi-Square dari Obs \*R-squared 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi

Tabel 4,5 Uji Autokorelasi dengan Uji Breusch-Pagan-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.393150	Prob. F(2,94)	0.6760
Obs*R-squared	0.821255	Prob. Chi-Square(2)	0.6632

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/26/17 Time: 19:37

Sample: 2013 2307

Included observations: 99

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENDAPATAN_ASLI_DA				
ERAH	-5.14E-11	1.21E-09	-0.042391	0.9663
BELANJA_MODAL	1.35E-10	1.83E-09	0.074085	0.9411
C	-0.026061	0.334047	-0.078017	0.9380
RESID(-1)	-0.065280	0.104060	-0.627325	0.5320
RESID(-2)	0.060065	0.103917	0.578012	0.5646
R-squared	0.008296	Mean dependent var		3.16E-16

Adjusted R-squared	-0.033905	S.D. dependent var	1.372575
S.E. of regression	1.395650	Akaike info criterion	3.553782
Sum squared resid	183.0967	Schwarz criterion	3.684849
Log likelihood	-170.9122	Hannan-Quinn criter.	3.606812
F-statistic	0.196575	Durbin-Watson stat	1.999797
Prob(F-statistic)	0.939609		

Sumber : hasil olahan software eviews 7

Berdasarkan tabel 4,5 nilai prob. Chi-Squared dari Obs \*R-squared = 0,6632 > 0,05, maka asumsi autokolerasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokolerasi yang tinggi pada residual

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (autokolerasi) juga dapat di uji dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Jika nilai statistik Durbin-Watson  $-2 \leq d \leq +2$ , maka asumsi indenpendensi terhadap residual (autokolerasi) terpenuhi. Sebaliknya bila nilai statistik Durbin-Watson  $< -2$  atau  $> 2$ , berarti asumsi autokolerasi tidak terpenuhi.

Tabel 4,6 uji autokolerasi dengan uji Durbin-Watson

Dependent Variable: PERTUMBUHAN\_EKONOMI  
Method: Least Squares  
Date: 10/26/17 Time: 20:45  
Sample: 2013 2307  
Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BELANJA_MODAL	2.78E-08	1.54E-09	18.05164	0.0000
PENDAPATAN_ASLI_DAER AH	-1.54E-08	1.49E-09	-10.29740	0.0000
R-squared	-2.512225	Mean dependent var		5.627778
Adjusted R-squared	-2.548434	S.D. dependent var		1.387761
S.E. of regression	2.614165	Akaike info criterion		4.779762
Sum squared resid	662.8845	Schwarz criterion		4.832189
Log likelihood	-234.5982	Hannan-Quinn criter.		4.800974
Durbin-Watson stat	1.814922			

Sumber : hasil olahan software eviews 7

Berdasarkan tabel 4,6 nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1.814. perhatikan bahwa nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara -2 dan +2, maka asumsi autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi yang tinggi pada residual

#### D. Pemilihan Metode Estimasi

Metode estimasi dalam teknik regresi data panel dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah

1. Metode Common Constant
2. Metode fixed Effect
3. Metode Random Effect

Berikut merupakan aplikasi dari pemilihan model

#### A. Penentuan Metode Estimasi antara Pooled Least Square dan Fixed Effect dengan Uji Chow

Untuk menentukan apakah metode estimasi pooled Least Square atau Fixed Effect dalam membentuk model regresi, maka digunakan uji Chow. Hipotesis yang diuji sebagai berikut

$HH_0$  : Model yang dihasilkan dengan metode estimasi Pooled Least Square lebih baik dibandingkan metode estimasi Fixed Effect

$HH_1$  : Model yang dihasilkan dengan metode estimasi Fixed Effect lebih baik dibandingkan metode estimasi Pooled Least Square. Aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis sebagai berikut

Jika nilai probabilitas cross section  $F < 0,05$  maka  $HH_0$  ditolak dan  $HH_1$  diterima, jika nilai probabilitas cross section  $F > 0,05$ , maka  $HH_0$  diterima dan  $HH_1$  ditolak

Berikut hasil berdasarkan uji Chow dengan menggunakan Eviews 7

Tabel 4,7 Hasil dari Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.900255	(32,64)	0.6199
Cross-section Chi-square	36.793484	32	0.2565

Sumber : hasil olahan software Eviews 7

Berdasarkan hasil dari uji Chow pada tabel 4,7, diketahui nilai probabilitas adalah 0.6199. karena nilai probabilitas  $0.05$  maka metode estimasi yang digunakan adalah metode Pooled Least Square

B. penentuan Metode Estimasi antara fixed Effect dan Random Effect dengan Uji Hausman

untuk menentukan apakah metode estimasi Pooled Least Square atau Fixed Effect dalam membentuk model regresi, maka digunakan uji Chow. Hipotesis yang diuji sebagai berikut

$HH_0$  : Model yang dihasilkan dengan metode estimasi Pooled Least Square lebih baik dibandingkan metode estimasi Fixed Effect

$HH_1$  : Model yang dihasilkan dengan metode estimasi Fixed Effect lebih baik dibandingkan metode estimasi Pooled Least Square. Aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis sebagai berikut

Jika nilai probabilitas cross section F  $> 0,05$  maka  $HH_0$  ditolak dan  $HH_1$  diterima, jika nilai probabilitas cross section F  $< 0,05$ , maka  $HH_0$  diterima dan  $HH_1$  ditolak

Berikut hasil berdasarkan uji Hausman dengan menggunakan Eviews 7

Tabel 4,8 Hasil dari Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.034313	2	0.5962

Berdasarkan hasil uji Hausman pada tabel 4,8, diketahui nilai probabilitas adalah 0.5962. karena nilai probabilitas <math>0.05</math> maka metode estimasi yang digunakan adalah metode Pooled Least Square

### 3. Uji Hipotesis

pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi pengujian signifikansi koefisien regresi parsial secara menyeluruh atau simultan (uji F), dan uji signifikansi koefisien regresi Parsial secara individual (uji t) nilai-nilai statistik dari koefisien determinasi, uji F, dan uji t tersaji pada gambar

Tabel 4.9 Nilai-nilai Statistik dari Koefisien Determinasi Uji F, dan Uji t

Dependent Variable: PERTUMBUHAN\_EKONOMI

Method: Least Squares

Date: 09/20/17 Time: 16:26

Sample: 2013 2307

Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENDAPATAN_ASLI_DAE				
RAH	-1.35E-09	1.19E-09	-1.136817	0.2584
BELANJA_MODAL	2.54E-09	1.80E-09	1.412083	0.1612
C	5.193032	0.329310	15.76946	0.0000
R-squared	0.021766	Mean dependent var		5.627778
Adjusted R-squared	0.001386	S.D. dependent var		1.387761
S.E. of regression	1.386799	Akaike info criterion		3.521708
Sum squared resid	184.6283	Schwarz criterion		3.600348

Log likelihood	-171.3245	Hannan-Quinn criter.	3.553526
F-statistic	1.067999	Durbin-Watson stat	2.136291
Prob(F-statistic)	0.347743		

#### Sumber Hasil Olahan Software Eviews

##### A. Uji model $R^2$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variabel-variabel tak bebas. Nilai determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel tak bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel bebas.

Berdasarkan gambar 4.9. Diketahui nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar  $R^2 = 0,0217$ . Nilai tersebut dapat diinterpretasikan belanja modal (BM) dan pendapatan asli daerah (PAD) mampu mempengaruhi/ menjelaskan pertumbuhan ekonomi (PE) secara simultan atau bersama-sama sebesar 21,7 % sisanya sebesar 78,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

##### B. Uji F

Uji signifikansi koefisien regresi parsial menyeluruh merupakan suatu uji untuk menguji apakah seluruh koefisien regresi parsial secara menyeluruh atau simultan sama dengan 0 atau tidak. Dengan kata lain, menguji

Apakah belanja modal (BM) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi (PE). Berikut perumusan hipotesisnya

$$H_0: B_1 = B_2 = 0$$

$H_1$  : tidak semua koefisien regresi parsial bernilai 0 Pada hipotesis nol, yakni  $H_0: B_1 = B_2 = 0$  berarti variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah secara bersamaan atau simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan paling tidak terdapat satu variabel bebas yang pengaruhnya signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 5%

Cara pengambilan keputusan terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas P dengan nilai tingkat signifikansi. Yakni jika nilai prob (F-statistik) tingkat signifikansi yang digunakan, dalam penelitian ini = 5% maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Jika nilai prob (F-statistik) tingkat signifikansi = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi Untuk pengambilan keputusan terhadap hipotesis, dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai statistik dari uji F terhadap nilai kritis berdasarkan tabel distribusi F. Sebelum menghitung nilai kritis F, terlebih dahulu menghitung nilai derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Berikut rumus untuk menghitung nilai derajat bebas pembilang dan penyebut

$$\text{Derajat bebas pembilang} = k - 1$$

$$\text{Derajat bebas penyebut} = n - k$$

Perhatikan bahwa n menyatakan jumlah elemen dalam sampel dan k menyatakan jumlah variabel. Derajat bebas pembilang adalah  $k - 1 = 3 - 1 = 2$  dan derajat bebas penyebut adalah  $99 - 3 = 96$ . Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% maka nilai kritis F dengan derajat bebas pembilang adalah 2, derajat bebas penyebut adalah 96, dan tingkat signifikansi 5% adalah 3,091.

Gambar 4.10 Perhitungan Nilai Kritis F dengan Microsoft Excel



Derajat Bebas			
Pembilang	Penyebut	Tingkat signifikansi	F Tabel
2	96	0,05	3,091191

Berikut ini adalah aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis berdasarkan uji F :

Jika nilai statistik dari uji F < nilai kritis, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Jika nilai statistik dari uji F > nilai kritis, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui nilai statistik dari uji F ( F- Statistic ) adalah 1.067999. karena nilai statistik dari uji F, yakni 1.067999 lebih kecil dibandingkan nilai kritis F, yakni 3,091, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh sangat lemah (tidak signifikan) secara statistik

### C. Uji t

Uji signifikansi koefisien regresi parsial secara individu merupakan suatu uji untuk menguji apakah nilai dari koefisien regresi parsial secara individu bernilai nol atau tidak .

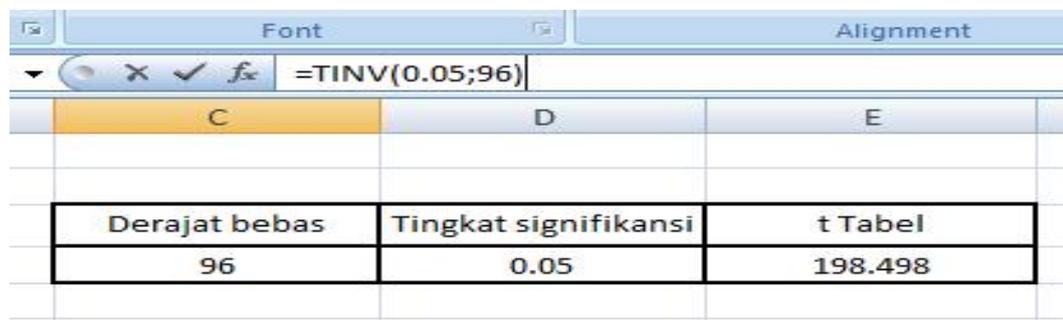
Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas P atau sig. Dengan nilai tingkat signifikansi, yakni . Jika nilai probabilitas P > tingkat signifikansi yang digunakan, dalam penelitian ini = 5%, maka nilai koefisien regresi parsial  $B_i = 0$ . Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Namun jika nilai probabilitas P < tingkat signifikansi yang digunakan, maka nilai koefisien regresi parsial  $B_i \neq 0$ . Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%

Cara lain pengambilan keputusan terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik dari uji t terhadap nilai kritis berdasarkan tabel distribusi t. Sebelum menghitung nilai kritis t, terlebih dahulu menghitung nilai derajat. Berikut rumus untuk menghitung nilai derajat bebas.

Derajat bebas =  $n - k$

$n$  merupakan jumlah elemen dalam sampel, sedangkan  $k$  merupakan jumlah variabel. Diketahui jumlah elemen dalam sampel sebanyak 99 dan jumlah variabel adalah 3, sehinggah derajat bebas adalah  $99 - 3 = 96$ . Tingkat signifikansi 5% sehinggah nilai kritis  $t$  dengan derajat bebas 96 da tingkat signifikansi 5%, berdasarkan tabel distribusi  $t$  adalah 1.98498 gambar dibawah ini merupakan perhitungan  $t$  tabel berdasarkan microsoft excel

Gambar .4,11 Perhitungan  $t$  Tabel Berdasarkan Microsoft Excel



Derajat bebas	Tingkat signifikansi	t Tabel
96	0.05	198.498

Berikut aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis berdasarkan uji  $t$

Jika  $[t_{hitung}] < [t_{kritis}]$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak

Jika  $[t_{hitung}] > [t_{kritis}]$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima

Berdasarkan gambar 4.4, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$PE = 5.1930 + 1.80 \times 10^{-9} + 1.19 \times 10^{-8}$$

### C. Pembahasan

#### A. Pengujian Pengaruh Belanja Modal ( BM ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui nilai probabilitas variabel belanja modal adalah 0.1612. karena nilai probabilitas belanja modal, yakni 0.1612 lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka disimpulkan bahwa pengaruh

yang terjadi antara belanja modal dengan variabel pertumbuhan ekonomi sangat lemah ( tidak signifikan ) secara statistik. Perhatikan juga bahwa nilai  $[t_{hitung}]$   $[t_{kritis}]$  , yakni  $[0.1612]$   $[1,9849]$ . Hasil dengan pendekatan probabilitas sama dengan hasil uji t.

#### B. Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Berdasarkan 4.4, diketahui nilai probabilitas variabel pendapatan asli daerah adalah 0.2584. karena nilai probabilitas pendapatan asli daerah, yakni 0.2584, lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara pendapatan asli daerah dengan variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik. Perhatikan juga bahwa nilai  $[t_{hitung}]$   $[t_{kritis}]$  , yakni  $[0.2584]$   $[1,9849]$ . Hasil dengan pendekatan probabilitas sama dengan hasil berdasarkan uji .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam babIV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tapi sangat lemah antara belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.
2. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari belanja modal sebesar  $0.1612 > 0.05$  setelah dilakukan uji t.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari PAD sebesar  $0.2584 > 0.05$  setelah dilakukan uji t.

#### **B. Saran**

Peneliti dapat memberikan beberapa saran dan keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Sampel dalam penelitian ini adalah 33 kabupaten/kota di 1 provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara sehingga hasil penelitian ini tidak menggambarkan secara general terhadap kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat hasil yang lebih akurat. Selain menambah jumlah sampel, peneliti selanjutnya disarankan mengambil data sampel di luar provinsi Sumatera Utara agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku juga kepada

kabupaten/kota di provinsi lainnya.

2. Variabel dalam penelitian ini hanya ada 2 variabel independen sehingga penelitian belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peneliti dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang lebih banyak.
3. Penelitian ini dilakukan dalam periode 3 tahun dari 2013 sampai 2015 disebabkan akses data yang terbatas. Untuk itu, peneliti dapat memberikan saran agar dapat menambah periode waktu penelitian agar dapat melakukan generalisasi terhadap penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali)*. Jurnal Studi Pembangunan Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga, 2005
- Bappenas , *Peta Kemampuan Provinsi Dalam Era Otonomi daerah: tinjauan atas kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2006
- Brata, Aloysius Gunadi, *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004
- Djarwanto Ps, *Statistik Sosial Ekonomi*, BPF, Yogyakarta, 2001
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, *Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-27 Juli 2007.
- Gujarati, Damodor N, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Erlangga, Jakarta, 2007
- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI 2003,
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta, 2003
- Harianto, David, Priyo Hari Adi, *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi. Juli. Makassar. 2007
- Ismerdekaningsih, Herlina & Endah Sri Rahayu, *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000)*. ITB Central Library, 2002
- Putong, Iskandar, *Pengantar ekonomi makro dan mikro*. Edisi Kedua. Giantar: Jakarta, 2003
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, 2004

- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change*. Chicago, 2000 Vol49.USA,
- Majidi, *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma .LP3ES. Jakarta, 2005
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2004
- Rimbawan, Nyoman Dayuh, *Statistik Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Udayana University Press, Denpasar. 2011
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.2003
- Sidik, Machfud, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung,2003
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Usman, Husaini, *Pengantar Statistika*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Warsito Kwedar, *Akuntansi Sektor Publik*. Undip. Semarang. 2008
- Wong, John D, *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 2012
- Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonomika dan Statistik dengan Eviews*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www. Kompas.com](http://www.kompas.com)

[www. Adityazni.blogspot.com](http://www.adityazni.blogspot.com)

## LAMPIRAN

NO	KOTA/KABUPATEN	Kriteria			Sampel
		1	2	3	
1	Asahan	√	√	√	1
2	Dairi	√	√	√	2
3	Deli serdang	√	√	√	3
4	Tanah karo	√	√	√	4
5	Labuhan batu	√	√	√	5
6	Langkat	√	√	√	6
7	Mandailing natal	√	√	√	7
8	Nias	√	√	√	8
9	Simalungun	√	√	√	9
10	Tapanuli selatan	√	√	√	10
11	Tapanuli tengah	√	√	√	11
12	Tapanuli utara	√	√	√	12
13	Toba samosir	√	√	√	13
14	Binjai	√	√	√	14
15	Medan	√	√	√	15
16	Pematang Siantar	√	√	√	16
17	Sibolga	√	√	√	17
18	Tanjung Balai	√	√	√	18
19	Tebing Tinggi	√	√	√	19
20	Padang Sidempuan	√	√	√	20
21	Pakpak Bharat	√	√	√	21
22	Nias Selatan	√	√	√	22
23	Humbang Hasundutan	√	√	√	23
24	Serdang Bedagai	√	√	√	24

Lampiran 1

D

aftar  
Sampel  
Kabupaten/kota  
di  
Provinsi  
Sumatera  
utara

25	Samosir	√	√	√	25
26	Batu Bara	√	√	√	26
27	Padang Lawas	√	√	√	27
28	Padang Lawas Utara	√	√	√	28
29	Labuhan Batu Selatan	√	√	√	29
30	Labuhan Batu Utara	√	√	√	30
31	Nias Utara	√	√	√	31
32	Nias Barat	√	√	√	32
33	Gunung Sitoli	√	√	√	33

## Lampiran 2

Data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun  
2013-2015

NO	KOTA/KABUPATEN	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		2013	2014	2015
1	Asahan	5,71	5,89	5,57
2	Dairi	5,05	5,03	5,04
3	Deli serdang	9,22	7,51	5,25
4	Tanah karo	4,95	5,09	5,01
5	Labuhan batu	5,95	5,22	5,04
6	Langkat	5,61	5,12	5,03
7	Mandailing natal	6,37	6,52	6,22
8	Nias	6,35	6,35	5,43
9	Simalungun	5,25	5,47	5,24
10	Tapanuli selatan	17,43	4,43	5,02
11	Tapanuli tengah	5,18	5,04	5,08
12	Tapanuli utara	5,27	5,11	4,81
13	Toba samosir	4,85	4,23	4,55
14	Binjai	6,01	5,83	5,40
15	Medan	5,36	5,36	5,74
16	Pematang Siantar	5,75	6,34	5,24
17	Sibolga	5,96	5,89	5,65
18	Tanjung Balai	5,94	5,78	5,58
19	Tebing Tinggi	6,01	5,45	4,86
20	Padang Sidempuan	5,80	5,17	5,04
21	Pakpak Bharat	5,91	5,92	5,93
22	Nias Selatan	4,65	4,32	4,46
23	Humbang Hasundutan	5,75	5,32	5,24
24	Serdang Bedagai	5,80	5,12	5,05
25	Samosir	6,10	5,95	5,77
26	Batu Bara	4,23	4,20	4,11
27	Padang Lawas	6,14	5,97	5,74

28	Padang Lawas Utara	6,15	6,08	5,94
29	Labuhan Batu Selatan	6,05	5,32	5,13
30	Labuhan Batu Utara	6,27	5,39	5,18
31	Nias Utara	6,34	5,56	5,49
32	Nias Barat	5,17	5,17	4,87
33	Gunung Sitoli	6,22	6,10	5,39

## Lampiran 3

Data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2015

NO	KOTA/KABUPATEN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
		2013	2014	2015
1	Asahan	54.038.000	59.130.000	71.256.000
2	Dairi	37.323.000	24.331.000	60.482.000
3	Deli serdang	465.000.000	566.665.000	630.721.000
4	Tanah karo	48.166.000	67.344.000	53.557.000
5	Labuhan batu	66.557.000	85.350.000	146.291.000
6	Langkat	68.972.000	114.868.000	110.900.000
7	Mandailing natal	47.000.000	50.000.000	65.721.000
8	Nias	30.533.000	44.642.000	63.721.000
9	Simalungun	63.738.000	110.000.000	112.414.000
10	Tapanuli selatan	64.087.000	77.253.000	98.439.000
11	Tapanuli tengah	26.660.000	32.447.000	47.720.000
12	Tapanuli utara	36.138.000	36.991.000	50.000.000
13	Toba samosir	19.007.000	23.409.000	34.198.000
14	Binjai	46.140.000	68.708.000	88.674.000
15	Medan	1.758.788.000	1.515.686.000	1.679.237.000
16	Pematang Siantar	71.612.000	57.807.000	130.135.000
17	Sibolga	30.587.000	36.216.000	60.531.000
18	Tanjung Balai	32.035.000	34.409.000	51.070.000
19	Tebing Tinggi	36.273.000	47.477.000	67.190.000
20	Padang Sidempuan	42.180.000	42.456.000	56.190.000
21	Pakpak Bharat	9.335.000	10.498.000	14.961.000
22	Nias Selatan	75.541.000	76.560.000	36.976.000
23	Humbang Hasundutan	15.213.000	26.959.000	27.753.000
24	Serdang Bedagai	53.785.000	61.004.000	72.419.000
25	Samosir	20.008.000	23.773.000	26.596.000
26	Batu Bara	35.362.000	29.448.000	43.361.000
27	Padang Lawas	29.905.000	34.251.000	40.112.000
28	Padang Lawas Utara	15.498.000	23.736.000	26.316.000
29	Labuhan Batu Selatan	130.288.000	35.635.000	39.900.000
30	Labuhan Batu Utara	23.207.000	28.547.000	30.421.000

31	Nias Utara	12.500.000	15.000.000	30.000.000
32	Nias Barat	8.200.000	10.000.000	20.000.000
33	Gunung Sitoli	20.478.000	28.400.000	34.400.000

## Lampiran 4

## Data Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2015

NO	KOTA/KABUPATEN	Belanja Modal		
		2013	2014	2015
1	Asahan	152.417.000	167.485.000	163.435.000
2	Dairi	142.118.000	129.624.000	123.913.000
3	Deli serdang	528.873.000	768.167.000	883.583.000
4	Tanah karo	196.765.000	217.981.000	129.190.000
5	Labuhan batu	197.527.000	199.079.000	231.784.000
6	Langkat	365.774.000	322.387.000	166.856.000
7	Mandailing natal	114.294.000	154.985.000	201.316.000
8	Nias	202.039.000	165.569.000	172.055.000
9	Simalungun	143.494.000	504.070.000	328.523.000
10	Tapanuli selatan	295.529.000	233.918.000	277.972.000
11	Tapanuli tengah	295.213.000	360.263.000	169.627.000
12	Tapanuli utara	172.108.000	125.899.000	166.666.000
13	Toba samosir	154.487.000	111.316.000	132.858.000
14	Binjai	196.688.000	207.486.000	177.248.000
15	Medan	1.201.667.000	956.334.000	1.080.394.000
16	Pematang Siantar	159.086.000	140.005.000	122.129.000
17	Sibolga	121.776.000	123.272.000	133.871.000
18	Tanjung Balai	185.913.000	182.285.000	98.657.000
19	Tebing Tinggi	104.332.000	150.600.000	137.526.000
20	Padang Sidempuan	142.706.000	99.388.000	103.227.000
21	Pakpak Bharat	129.937.000	155.458.000	132.078.000
22	Nias Selatan	363.937.000	265.828.000	266.933.000
23	Humbang Hasundutan	210.173.000	169.977.000	157.235.000
24	Serdang Bedagai	253.236.000	227.944.000	183.166.000
25	Samosir	186.891.000	202.664.000	144.616.000
26	Batu Bara	238.534.000	149.118.000	198.799.000
27	Padang Lawas	172.606.000	139.719.000	195.004.000
28	Padang Lawas Utara	276.030.000	132.814.000	170.453.000
29	Labuhan Batu Selatan	324.466.000	232.921.000	167.072.000
30	Labuhan Batu Utara	148.102.000	156.213.000	164.723.000
31	Nias Utara	170.358.000	147.076.000	209.933.000
32	Nias Barat	170.355.000	165.050.000	226.104.000
33	Gunung Sitoli	151.576.000	178.171.000	175.711.000

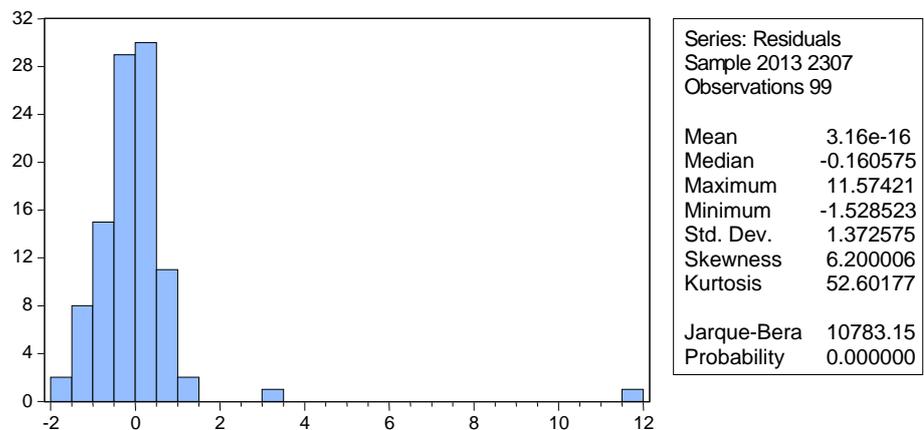
## Lampiran 5

## Statistik Deskriptif

	Pendapatan asli daerah	Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi
Mean	112270868.7	229711701.4	5.6277777788
Median	43361000	170453000	5.43
Maximum	1758788000	1201667000	17.43
Minimum	8200000	163435	4.11
Std. Dev	2.89152160.6	193085370.3	1.387761048
Skweness	4.874692748	3.414324182	6.529270817
Kurtosis	23.89506225	12.38565194	54.27535555
Sum	11114816000	22741458435	557.15
Observations	99	99	99

## Lampiran 6

## Uji Normalitas



## Lampiran 7

## Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

	PAD	Belanja Modal
PAD	1.000000	0,663527
Belanja Modal	0.663527	1.000000

## Lampiran 8

## Uji Heteroskeditas dengan uji White

## Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.292059	Prob. F(2,96)	0.7474
Obs*R-squared	0.598729	Prob. Chi-Square(2)	0.7413
Scaled explained SS	14.52571	Prob. Chi-Square(2)	0.0007

## Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/19/17 Time: 21:29

Sample: 2013 2307

Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	1.310412	1.616253	0.810772	0.4195
PENDAPATAN_ASLI_DA				
ERAH^2	-5.95E-18	7.84E-18	-0.759166	0.4496
BELANJA_MODAL^2	1.25E-17	1.69E-17	0.738561	0.4620
R-squared	0.006048	Mean dependent var	1.864933	
Adjusted R-squared	-0.014660	S.D. dependent var	13.46480	
S.E. of regression	13.56314	Akaike info criterion	8.082423	
Sum squared resid	17660.04	Schwarz criterion	8.161063	
Log likelihood	-397.0799	Hannan-Quinn criter.	8.114241	
F-statistic	0.292059	Durbin-Watson stat	2.031041	
Prob(F-statistic)	0.747385			

## Lampiran 9

## uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.900255	(32,64)	0.6199
Cross-section Chi-square	36.793484	32	0.2565

## Lampiran 10

## Uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.034313	2	0.5962

## Lampiran 11

Dependent Variable: PERTUMBUHAN\_EKONOMI

Method: Least Squares

Date: 09/20/17 Time: 16:26

Sample: 2013 2307

Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENDAPATAN_ASLI_				
DAERAH	-1.35E-09	1.19E-09	-1.136817	0.2584
BELANJA_MODAL	2.54E-09	1.80E-09	1.412083	0.1612
C	5.193032	0.329310	15.76946	0.0000
R-squared	0.021766	Mean dependent var	5.627778	
Adjusted R-squared	0.001386	S.D. dependent var	1.387761	
S.E. of regression	1.386799	Akaike info criterion	3.521708	
Sum squared resid	184.6283	Schwarz criterion	3.600348	
Log likelihood	-171.3245	Hannan-Quinn criter.	3.553526	
F-statistic	1.067999	Durbin-Watson stat	2.136291	
Prob(F-statistic)	0.347743			